

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI PERANCANGAN WEB RINCIAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Divia Aulia¹, Yahfizham²

1,2) Sistem Informasi, Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 12 April 2024

Revised: 19 April 2024

Accepted: 29 April 2024

ABSTRACT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memajemen proyek sistem informasi perancangan web rincian penerbitan surat perintah pencairan dana pada badan keuangan aset dan daerah. Dimana, di dalam BKAD terdapat beberapa sistem pengelolaan keuangan diantaranya E-Keuangan, CMS, SIMBADA, E-Absensi, SIMDA. Diantara aplikasiaplikasi tersebut masih terdapat kekurangan contohnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masih terhitung banyak memiliki data. Jenis penelitian ini diklasifikasikan pada jenis penelitian survei, yang menggunakan instrumen *Public Financial Management* (PFM). Hasil penelitian yang didapat yaitu, Penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi dapat mengoptimalkan pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mengurangi keterlibatan manual, dan mempercepat alur kerja.

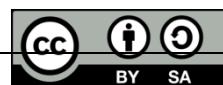
Kata Kunci: Sistem Informasi, Perancangan Web, BKAD.

Abstract

This research aims to manage a web design information system project detailing the issuance of funds disbursement orders to asset and regional financial agencies. Where, in BKAD there are several financial management systems including E-Finance, CMS, SIMBADA, E-Attendance, SIMDA. Among these applications there are still shortcomings, for example the Fund Disbursement Order (SP2D) which still contains a lot of data. This type of research is classified as survey research, which uses Public Financial Management (PFM) instruments. The research results obtained are, the implementation of an integrated financial information system can optimize the creation of Fund Disbursement Orders (SP2D) and Budget Implementation Documents (DPA), reduce manual involvement, and speed up work flow.

Keywords: Information Systems, Web Design, BKAD.

Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)).



Corresponding Author:

E-mail : dipaaulia34@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi abad 21 sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang pesat dari teknologi informasi yang telah mengarah pada sistem digitalisasi. Proses dan transmisi informasi digital mempengaruhi seluruh aspek pengelolaan suatu organisasi menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan produktif. Model, disain, instalasi, konfigurasi, infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan berbasis teknologi informasi juga selalu mengalami perubahan dan pembaruan-pembaruan signifikan yang memudahkan hampir pada semua bidang pekerjaan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, suatu organisasi pada akhirnya mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan kompleks (Bandono, n.d., p. 38).

Komputer bukanlah hal baru. Kita melihat dan merasakan efek microchip di sekitar kita, mulai dari pemutar DVD hingga oven microwave. Namun, sering kali kita gagal menerapkan teknologi baru ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita atau kita hanya berhasil mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya kita lakukan dengan tangan. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak menggunakan komputer secara maksimal, dua di antaranya adalah "semuanya berfungsi dengan baik sebagaimana adanya" dan "Saya bukan auditor IS". Namun kita tidak bisa mengabaikan peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi secara tepat. Otomatisasi sekarang diperlukan dalam fungsi audit baik untuk manajemen organisasi audit maupun instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit menyeluruh. Bahkan dengan pendekatan manual yang telah teruji dan benar, auditor tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan tersebut dalam dunia teknologi yang rumit saat ini, di mana perubahan tidak dapat dihindari. Auditor harus mengikuti perkembangan teknologi dan menjadi pengguna instrumen baru yang cerdas. Tidaklah realistis lagi membayangkan seorang auditor dengan lengan baju digulung, kalkulator di tangan,

dan tumpukan kertas berserakan. Otomatisasi kini menjadi bagian dari rumah, perusahaan, dan sekolah kita; organisasi audit harus menerimanya (Raharjo, n.d., p. 1). Keterlibatan audit internal menjadi penting dalam menjamin kualitas audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal pada suatu perusahaan, mengingat dinamika bisnis yang semakin rumit. (Utami et al., n.d., p. 54)

Pemerintah daerah kini mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai dampak dari desentralisasi fiskal yang berlangsung sejak berdirinya otonomi daerah. Seiring dengan pengalihan kewenangan tersebut, pemerintah pusat juga mentransfer sumber keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Meningkatnya kekuasaan pemerintah daerah, karena besarnya wilayah, maka diperlukan tata kelola keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, perbaikan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung pelayanan publik daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Organisasi pemerintah yang harus ditingkatkan kinerja birokrasinya salah satunya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Belanja. Tanggung jawab utama sektor pengeluaran adalah persiapan anggaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan (Mulaningsih, n.d., p. 129). Produk BPKP bernama SIMDA— yang akan dibahas lebih lanjut nanti—dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah memberikan output berupa pelaporan keuangan yang bertanggung jawab, efisien, dan sukses. SIMDA ini terdiri dari empat kategori: SIMDA Keuangan, SIMDA Properti Daerah (BMD), SIMDA (Ramanda et al., 2021, p. 1588)

Integrasi penggunaan data terkait kemajuan pembangunan di setiap instansi pemerintah juga dapat didukung oleh sistem ini. Tanggung jawab penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan berada pada BPKAD Kota Medan (Nasution & M.Si, 2021). Jika laporan keuangan berisi informasi berharga dan membantu dalam pengambilan keputusan, maka penggunaannya akan memperoleh manfaat darinya. Agar laporan keuangan pemerintah mencapai

tingkat kualitas yang sesuai, maka aspek kualitatif laporan keuangan merupakan syarat normative (Septony, n.d.).

Selama survei penelitian di kantor BKAD Provsu, proses Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap kegiatan dimulai dengan pembuatan Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana (NP2D), yang dibuat secara manual dengan menggunakan program Microsoft Excel berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DPA. Setelah Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana (NP2D) dicetak dan ditandatangani, kemudian dikirimkan secara manual melalui pengantar surat kepada pihak verifikator NP2D. Kendala jarak yang cukup jauh dapat menyebabkan hambatan atau kendala lainnya. Setelah diterima dan disetujui oleh verifikator, proses selanjutnya adalah pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan prosedur manual menggunakan program Microsoft Excel. Hasilnya berupa dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-BP). Jika tidak disetujui, berkas yang terkait dengan kegiatan tersebut akan dibuat kembali, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan apabila persyaratan telah terpenuhi dan disetujui, pihak Bendahara Pengeluaran (BP) akan menerbitkan SP2D-BP untuk melaksanakan pencairan anggaran kegiatan. Ada tiga factor yang diduga berpengaruh terhadap efektifitas pencairan dana penerbitan SP2D. Ketiga factor ini adalah pengawasan, Standard Operating Procedure (SOP) dan kualitas SDM (Kadmaer, 2020, p. 28).

Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di Divisi Perbendaharaan BKAD Provsu, solusi yang dapat diambil adalah melakukan transformasi digital pada proses tersebut. Penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi dapat mengoptimalkan pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mengurangi keterlibatan manual, dan mempercepat alur kerja. Selanjutnya, pemindahan proses pembuatan Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana (NP2D) dan SP2D ke platform digital akan menghilangkan keterlibatan Excel dan pengiriman manual, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dan data yang dikumpulkan akan disajikan secara kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara metodis, faktual, dan tepat mengenai fakta dan ciri-ciri masyarakat di suatu daerah (Hadian et al., 2023, p. 312). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei karena menggunakan alat Manajemen Keuangan Publik (PFM). Unit analisis dalam penelitian survei ini adalah Badan Pembiayaan Aset dan Daerah (BKAD) dengan beberapa departemen, biro, dan lembaga yang berkaitan dengan beberapa bidang penting.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penerapan sistem Perbendaharaan dan Anggaran (SPAN), Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penanganan dan Pengelolaan Perintah Pencairan Uang Kembali. Untuk melaksanakan pengeluaran APBN berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar), KPPN atas nama BUN menerbitkan surat yang dikenal dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengguna anggaran yang ditunjuk harus menandatangani Surat Perintah Pembayaran untuk memasukkan uang yang diterima ke dalam DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran).

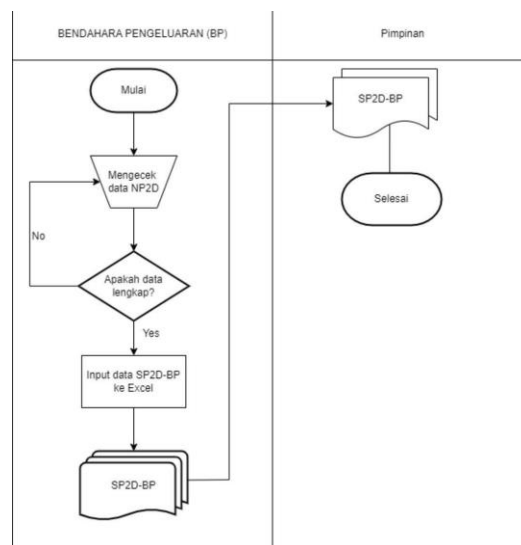
KPPN merupakan bagian dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, mendapat izin dari BUN untuk membidangi pengeluaran APBN, dan mengeluarkan uang pada saat Bendahara Umum Negara mendapat SPM. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui Bank dengan menggunakan SP2D. SP2D kepada satuan kerja di bawahnya sebagai landasan pengalokasian dana belanja anggaran yang digunakan satuan kerja untuk menutup biaya pegawai terkait.

SPM yang telah disampaikan oleh unit kerja akan diperiksa kembali; apabila sesuai protokol, KPPN selaku Bendahara Umum Negara akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Namun dalam proses pemberlakuan perintah ini, Bank tetap

melakukan pengembalian SP2D karena adanya kesalahan sehingga dana tidak dapat dialokasikan atau digolongkan sebagai pengembalian. SP2D. Setelah dilakukan evaluasi ulang terhadap SPM satuan kerja, apabila sudah sesuai protokol maka KPPN akan mengeluarkan perintah pencairan dana selaku Bendahara Umum Negara, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa SP2D yang tetap dikembalikan oleh Bank karena kesalahan yang menghalangi. uang tersebut tidak ditugaskan atau diklasifikasikan sebagai pengembalian (Nina et al., 2023, pp. 151–152).

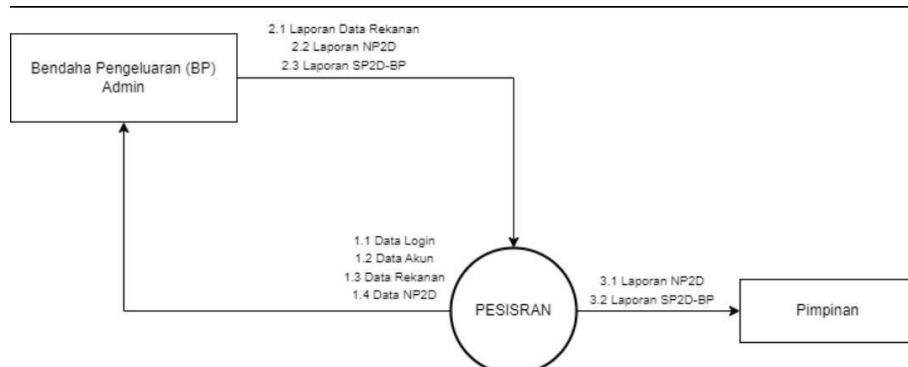
Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di Divisi Perbendaharaan BKAD Provsu, solusi yang dapat diambil adalah melakukan transformasi digital pada proses tersebut. Penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi dapat mengoptimalkan pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mengurangi keterlibatan manual, dan mempercepat alur kerja. Selanjutnya, pemindahan proses pembuatan Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana (NP2D) dan SP2D ke platform digital akan menghilangkan keterlibatan Excel dan pengiriman manual, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

1) Flowmap sistem informasi yang dirancang



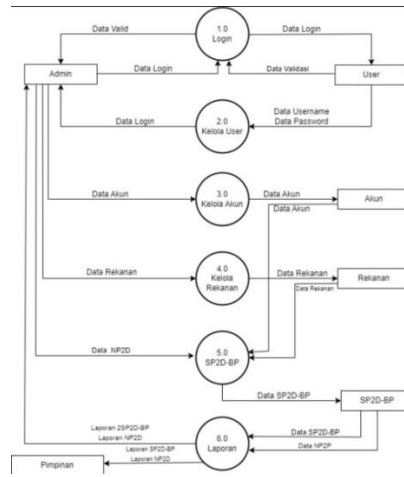
Gambar 3. Flowmap Perancangan Web yang Dirancang

2. Diagram konteks



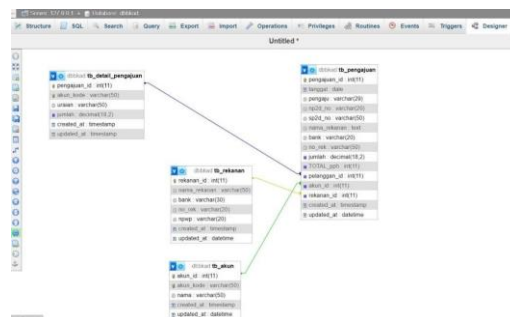
Gambar 4. Diagram Konteks

3. Data Flow Diagram (DFD Level 0)



Gambar 5. Data Flow Diagram (DFD) Level 0

4. Relasi tabel



Gambar 6. Relasi Tabel

5. Implementasi sistem

Pada tahapan implementasi sistem, Penulis menggambarkan tampilan layar untuk program perancangan web Perancangan Sistem Anggaran (PESISRAN) berikut tampilan yang dirancang:

a. Form Tampilan Depan

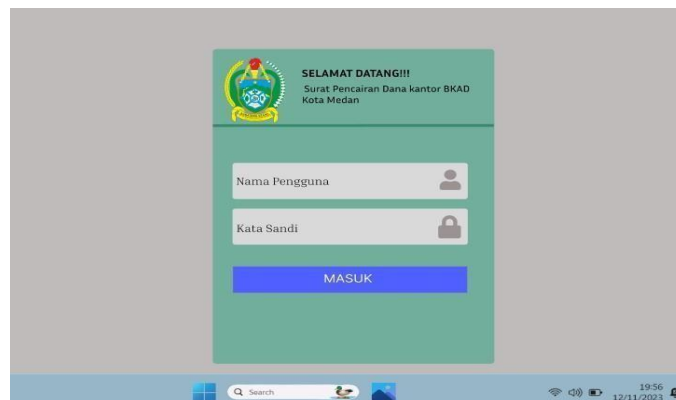
Berikut merupakan tampilan depan awal user untuk melakukan login.



Gambar 7. Tampilan Halaman Depan

b. Form Login

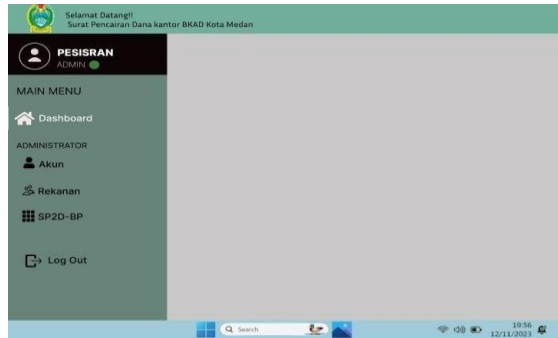
Berikut merupakan tampilan saat user melakukan login dengan menginput username dan password untuk selanjutnya dapat masuk ke halaman menu pada aplikasi.



Gambar 8. Tampilan Halaman Login

c. Menu Dashboard

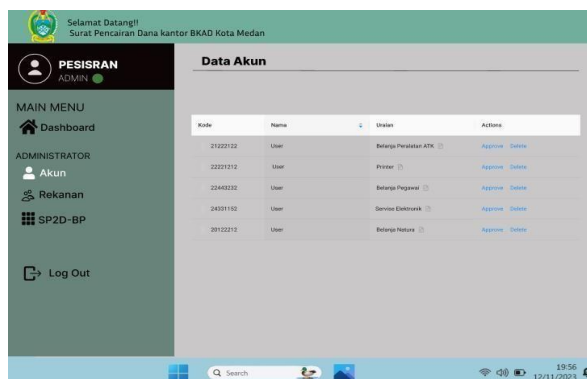
Berikut merupakan tampilan menu utama setelah user melakukan login. Didalamnya terdapat beberapa pilihan menu user pilihlah sesuai kebutuhan.



Gambar 9. Tampilan Dashboard

d. Data Akun

Berikut merupakan tampilan data akun yang diperlukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 10. Tampilan Data Akun

e. Data Rekanan

Berikut merupakan tampilan data rekanan yang akan mengajukan pencairan



The screenshot shows a web application interface for 'PESISIRAN ADMIN'. The main content area is titled 'Data Rekanan' and contains a table with the following data:

ID Rekanan	Nama Rekanan	Bank	No Rekening	NPWP	
IR-001	JJK Taspen	BCA	072122013	2312121212	
IR-002	PT. POS Indonesia	BRI	1212122221	121212120020	
IR-003	Pojok UMKM	BNI	7021299922	221212121212	
IR-004	UMKM Medan Barat	Mandiri	721212222	21212121212	
IR-005	PLN Parsero	BCA	072121212	2121289921	

Gambar 11. Tampilan Data Rekanan

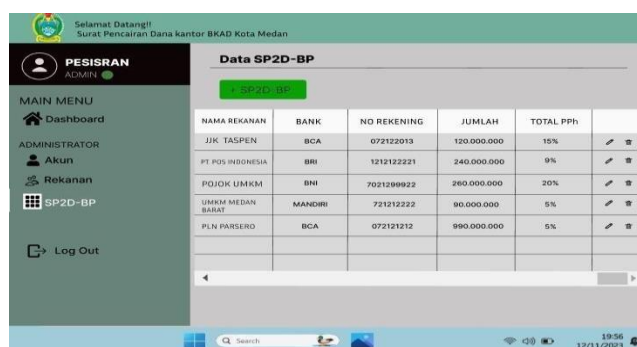
f. Tampilan SPD2-BP

Berikut merupakan tampilan tanggal perhitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.



The screenshot shows a web application interface for 'PESISIRAN ADMIN'. The main content area is titled 'Data SPD2-BP' and contains a table with the following data:

ID PENGAJUAN	TANGGAL	PENGAJU	No NP2D	No SP2D
IP-0221	21/07/2023	DIVA AULIA	NN-0123	N231-S2221
IP-0222	10/11/2023	ADELVA S.	NN-0124	N232-S2222
IP-0223	10/12/2023	WINDI ANINDA	NN-0125	N233-S2223
IP-0224	22/12/2023	NURUL SAFIRA	NN-0126	N234-S2224
IP-0225	12/12/2023	ZAINI SYARIFUDIN	NN-0127	N235-S2225



The screenshot shows a web application interface for 'PESISIRAN ADMIN'. The main content area is titled 'Data SPD2-BP' and contains a table with the following data:

NAMA REKANAN	BANK	NO REKENING	JUMLAH	TOTAL PPh	
JJK TASPEN	BCA	072122013	120.000.000	15%	
PT POS INDONESIA	BRI	1212122221	240.000.000	9%	
POJOK UMKM	BNI	7021299922	260.000.000	20%	
UMKM MEDAN BARAT	MANDIRI	721212222	90.000.000	5%	
PLN PARSERO	BCA	072121212	990.000.000	5%	

Gambar 12. Tampilan SPD2-BP

g. Laporan Nota Pemindahbukuan Dana (NP2D)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA BENDAHARA
PENGELUARAN (SP2D-BP)

DARI : DIVA AULIA, MKOM, Selaku pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
KEPADA : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Medan Polonia

TAHUN ANGGARAN : 2023

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Giro pengeluaran pada:

Kepada : JIK Taspen
Nama Rekening : JIK taspen
No.Rekening Bank : 072122013
Bank : BCA
No.SP2D :
Keperluan Untuk : Belanja Premi Asuransi

No.	Kode Rekening	No. Kaitansi	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
1	5.5	05.005/BPK/PPM/Pas Kal/2023	Belanja Premi Asuransi	Rp.3.450.000

Kepada : Kas Negara
NPWP : 2312121212
Nama WP : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Medan Polonia
No.Rekening Bank : 0702212065
Bank : Mandiri
Keperluan Untuk : -|

Gambar 13. Tampilan Laporan Pemindahbukuan Dana (NP2D)

h. Laporan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA BENDAHARA
PENGELUARAN (SP2D-BP)

DARI : ADELLA SAKINAH M, Selaku pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
KEPADA : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
: Bendahara Pengeluaran Kecamatan Medan Polonia

TAHUN ANGGARAN : 2023

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Giro pengeluaran pada:

Bank : BNI
No.Rekening Bank : 072122013
Nama Rekening : Kecamatan Medan Polonia
Total Uang Sebesar : 3.450.000

Kepada : JIK Taspen
Nama Rekening : JIK Taspen
No.Rekening Bank : 072122013
Bank : BCA
Keperluan Untuk : Belanja Premi Asuransi

No.	Kode Rekening	No. Kaitansi	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
1	5.5	05.005/BPK/PPM/Pas Kal/2023	Belanja Premi Asuransi	Rp.3.450.000

Kepada : Kas Negara
NPWP : 2312121212
Nama WP : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Medan Polonia
No.Rekening Bank : 0702212065
Bank : Mandiri
Keperluan Untuk : Belanja Premi Asuransi

Gambar 14. Tampilan Laporan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Penggunaan Big Data dan analisis data dalam administrasi publik pada era digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemanfaatan Big Data dan analisis data dalam administrasi publik Pengumpulan Data Era digital menciptakan berbagai sumber data baru dari berbagai sumber, seperti sensor, ponsel cerdas, media sosial, transaksi online, dan lain-lain. Administrasi publik dapat mengumpulkan data dari sumber-sumber ini untuk memahami lebih baik

tentang perilaku masyarakat, kebutuhan mereka, dan masalah yang dihadapi. (Sepriano, n.d., p. 7)

Didalam BKAD terdapat beberapa sistem pengelolaan keuangan diantaranya E-Keuangan, CMS, SIMBADA, E-Absensi, SIMDA. Diantara aplikasi- aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan contohnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masih terhitung banyak memiliki data. Surat pencairan dana sebelumnya menggunakan sistem manual yaitu harus dengan menuliskan satu per satu ke excel. Jika terdapat banyak dana yang ingin dicairkan maka akan sangat menyulitkan dan sudah pasti sangat membuang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya sistem tersebut, akan sangat membantu memudahkan untuk tidak kehilangan data surat perintah pencairan dana (SP2D) dan menghemat waktu. Karena informasi tersebut harus sinkron untuk perkembangan pembangunan daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur kesesuaian data antara informasi perencanaan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah dalam pelaksanaan SIPD (Vitriana et al., 2022, p. 9).

Teknologi memfasilitasi operasi bisnis sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan . Tentu saja seiring berkembangnya teknologi, ancaman-ancaman baru pun akan bermunculan. Untuk mengelola sistem dan mencegah kesalahan, organisasi harus menetapkan pengendalian sistem informasi jika terjadi kesalahan entri data, kesalahan penyimpanan, atau kesalahan lain yang berdampak pada sistem informasi. Teknologi memfasilitasi operasi bisnis sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Tentu saja seiring berkembangnya teknologi, ancaman-ancaman baru pun akan bermunculan. Untuk mengelola sistem dan mencegah kesalahan, organisasi harus menetapkan pengendalian sistem informasi jika terjadi kesalahan entri data, kesalahan penyimpanan, atau kesalahan lain yang berdampak pada sistem informasi (Nisaa et al., n.d., p. 265).

Sistem aplikasi SISPERAN diharapkan dapat mempermudah proses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Catatan Permintaan Transfer Dana (NP2D)

bagi pihak kecamatan, khususnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran (BP), di cara yang lebih efektif dan efisien sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang sering terjadi (Ramandha, 2022, p. 3456). Faktor tambahannya antara lain ketepatan dalam menagih pengeluaran APBD sesuai dengan perintah pembayaran, menentukan apakah tersedia cukup dana, menerbitkan perintah pembayaran atas penggunaan anggaran sesuai dengan persyaratan, dan menolak penyaluran dana. Karena banyak OPD yang kini bahkan tidak bertugas melakukan pemotongan pajak, maka perlu memperhatikan pajak yang dikenakan agar dapat mempercepat proses persetujuan pelaksanaan belanja OPD (Fibriyanti S. Lakoro & Sukrianto, 2022, p. 240).

4. SIMPULAN

Didalam BKAD terdapat beberapa sistem pengelolaan keuangan diantaranya E-Keuangan, CMS, SIMBADA, E-Absensi, SIMDA. Diantara aplikasiaplikasi tersebut masih terdapat kekurangan contohnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masih terhitung banyak memiliki data. Surat pencairan dana sebelumnya menggunakan sistem manual yaitu harus dengan menuliskan satu per satu ke excel. Jika terdapat banyak dana yang ingin dicairkan maka akan sangat menyulitkan dan sudah pasti sangat membuang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya sistem tersebut, akan sangat membantu memudahkan untuk tidak kehilangan data surat perintah pencairan dana (SP2D) dan menghemat waktu.

Pustaka

- Bandono, A. (n.d.). *Manajemen Organisasi: Konsep, Strategi dan Aplikasi*.
- Fibriyanti S. Lakoro & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253>
- Hadian, N., Hakim, M., & Fanani, M. R. (2023). Implementasi Model Service-Oriented Architecture (SOA) dalam Perancangan Sistem Informasi UMKM. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(3), 311–318. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i3.879>
- Kadmaer, E. A. (2020). Analisis Efektifitas Pencairan Dana Pada di Pemerintah Daerah: Kajian Empiris di Provinsi Papua Barat. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 5(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1215>

- Mulaningsih, S. (n.d.). AKUNTABILITAS PELAYANAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA. 4(5), 128–140.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nina, W. I., Chairiyaton, C., & Sianturi, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Prosedur Penanganan Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 150–159. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i1.1001>
- Nisaa, R. K., Bahrim, S. M. S., & Kustiwi, I. A. (n.d.). *Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan: Studi Literatur*.
- Raharjo, B. (n.d.). *Audit Sistem Informasi Akuntansi*.
- Ramanda, A., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2021). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda Bmd). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1585. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.5349>
- Ramandha, A. (2022). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Berbasis Desktop Di Kecamatan Cimahi Utara. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(4), 3443–3457. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i4.2869>
- Sepriano. (n.d.). *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK MENGHADAPI ERA DIGITAL*.
- Septony, B. S. (n.d.). *PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN*.
- Utami, A. P., Vindalia, N., Febriyan, I., Gamara, B., & Manurung, H. (n.d.). *Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan*.
- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>